

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH,
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH DAN PENGAWASAN FUNGSIONAL
TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pariaman)**

Oleh:

Lopita Turwirdani

Pembimbing :Restu Agusti dan Sem Paulus

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail :lopita.turwirdani@yahoo.co.id

The Effect of Government Internal Control System, The Competence Of Human Resources, Financial Accounting Systems Area and Functional Supervision On Effectiveness Of Financial Management Area.

ABSTRACT

This study aimed to examine the influence of the government internal control system, the competence human resources, financial accounting systems area, and functional supervision on effectiveness of financial management area. The research was conducted on the regional work units of Pariaman. This study used purposive sampling method. The sample in this study is the Head of SKPD, Secretary of SKPD, Head of Sub Division of Finance, and Chief Financial administrator. The sample used in this study were 76 respondents. The statistical method used to test the hypothesis of the research is multiple linear regression analysis using SPSS. The results showed that the variables of the government internal control system, the competence of human resources, financial accounting systems area, and functional supervision influence on effectiveness of financial management area pariaman city.

Keywords: Internal control, competence, financial accounting, and supervision, effectiveness.

PENDAHULUAN

Dalam hal kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan

bertanggung jawab. Kemudian diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang

sehingga diperlukan pengelolaan keuangan negara yang cepat, tepat, dan akurat agar mencapai sasaran yang diinginkan dengan disertai perhatian pada segi-segi efisiensi kehematannya.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Lamusu, 2013). Pengelolaan keuangan daerah yang ada pada suatu instansi harus ditata dengan sedemikian rupa agar pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan efektif. Efektivitas pengelolaan keuangan adalah tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatannya.

Dalam penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan Lampiran Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) atas laporan keuangan semester I tahun 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Pariaman untuk tahun 2009-2013 menunjukkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kecuali pada tahun 2012 mengalami perubahan yaitu WTP dan tahun

2013 kembali mendapatkan opini WDP.

Tabel 1
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2009 s.d 2013

No	Tahun	Opini
1.	2009	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2.	2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3.	2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4.	2012	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5.	2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber: BPK RI IHPS Semester I, 2014 lampiran 7

Sistem pengendalian intern merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan suatu organisasi sektor publik. Masing-masing lembaga pemerintah sebaiknya memiliki suatu sistem pengendalian yang agar dapat meminimalkan risiko yang ada. Sistem pengendalian intern ini sangat diperlukan didalam pemerintahan agar terhindar dari kecurangan yang mungkin akan dilakukan oleh pihak-pihak didalam sebuah instansi pemerintahan tersebut.

Agar pengelolaan keuangan menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas maka diperlukan sumber daya manusia yang memahami dan berkompeten dalam akuntansi pemerintahan. Dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan berpedoman pada standar yang telah ditentukan. Dalam hal ini yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Di mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman di daam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan (Wati dkk,2014).

Disamping itu dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi. Di mana untuk menghasilkan laporan keuangan daerah dibutuhkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan (Wati dkk,2014). Dengan adanya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan efektif agar penatausahaan keuangan daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi (Pradita,2010)

Selain itu, salah satu untuk mendukung efektifitas pengelolaan keuangan daerah maka dibutuhkan fungsi pengawasan. Dengan adanya pengawasan fungsional dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan (Wulandari,2013).

Inspektorat memiliki peran penting sebagai pengawas fungsional intern pemerintah. Berdasarkan PP No.60 tahun 2008, inspektorat

daerah melakukan pengawasan fungsional intern yaitu seluruh kegiatan audit, review, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pertanggungjawabannya. Dengan adanya pengawasan fungsional dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah Saleba (2014), Pradita (2010) dan Sinta Suhandi Wati (2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perluasan sampel, serta lokasi penelitian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dan apakah pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah, pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah., pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pengaruh pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah merupakan suatu sistem nilai yang digunakan setiap organisasi (lembaga) untuk dapat mengukur keberhasilan (prestasi) dari suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007:330).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia organisasi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sesuai dengan yang dibebankan oleh organisasi. Kompetensi yang harus dikuasai oleh sumber daya manusia perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai, sebagai wujud hasil pelaksanaan tugas yang mengacu pada pengalaman langsung.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Darise (2008:41) sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian proses atau prosedur, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pengawasan Fungsional

Sonny Sumarsono (2010:253) menyatakan bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah. Sasaran pelaksanaan pengawasan ini mencakup baik pelaksanaan tugas umum pemerintah maupun pelaksanaan pembangunan. Tujuannya adalah agar pelaksanaan tugas umum dan pembangunan itu sesuai rencana peraturan perundang-undangan pemerintah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Apabila sistem pengendalian intern pemerintah dilaksanakan, maka keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi serta kepatuhan terhadap perundang-undangan bisa tercapai sehingga pengelolaan keuangan daerah akan terlaksana secara efektif. Salah satu unsur penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Sistem Pengendalian Intern, masing-masing lembaga pemerintah harus memiliki sistem pengendalian intern agar dapat meminimalkan risiko yang ada.

Pengaruh Kompetensi sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Suatu sistem dapat terlaksana dengan baik apabila sumber daya manusia dalam pemerintahan memiliki pengembangan yang berbasis kompeten sehingga dapat memberikan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang sudah ditetapkan. Agar pengelolaan keuangan daerah menghasilkan LKPD yang berkualitas diperlukan sumber daya manusia yang memahami serta berkompeten pemerintahan. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) bertujuan untuk

akuntabilitas, manajerial dan pengawasan yang hasil akhirnya adalah informasi keuangan. Informasi keuangan tersebut akan digunakan untuk pengambilan keputusan-keputusan, tindakan-tindakan dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengelola keuangan daerah membutuhkan suatu perencanaan, perencanaan ini digunakan agar keuangan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabilitas sehingga informasi yang terdapat didalam keuangan daerah dapat berguna untuk tahun berikutnya.

Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan adanya pengawasan fungsional dari pihak internal dan eksternal maka akan menjamin terlaksananya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang bersih dan berwibawa dan pengelolaan keuangan secara ekonomis, efisien dan efektif serta mencegah penyimpangan-penyimpangan atau hambatan dalam pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan fungsional merupakan bagian penting dalam praktik pengawasan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Pariaman. Waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 sampai selesai.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pariaman pada tahun 2014.

Pemilihan sampel penelitian ini didasarkan pada metode *purposive sampling*, dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi sebagai kepala SKPD dan akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD Kota Pariaman yang berjumlah 19 SKPD pada tahun 2014. Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa Kepala SKPD, Kepala Sub Bagian Keuangan, Sekretaris Keuangan, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD merupakan pihak yang terkait langsung dalam pengelolaan keuangan daerah. Responden dalam penelitian ini berjumlah 76 orang yang didapat dari jumlah untuk 19 SKPD yang ada dan masing-masing SKPD ada 4 responden.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei, yaitu informasi yang dikumpulkan dari responden menggunakan kuesioner dengan teknik pengumpulan informasi yang dilakukan yaitu menyusun daftar pertanyaan.

Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah sumber data dilakukan, dalam hal ini berasal dari jawaban yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:193). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statistical Package for Sosial Sciences 21* (SPSS 21).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel umumnya dikategorikan menjadi variabel dependen dan variabel independen.

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah efektifitas pengelolaan keuangan daerah (Y). Dengan 9 item pertanyaan sesuai dengan tujuan pengelolaan keuangan daerah yang dikemukakan oleh Halim (2007) yaitu tanggung jawab, dapat memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna yang efektif dan efisiensi serta pengendalian. Pengembangan indikator pertanyaan kuesioner diambil dari Lamusu (2010).

Variabel Independen (X)

a. Sistem Pengendalian Intern (X_1)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan 15 item pertanyaan sesuai dengan unsur sistem pengendalian internal yang terdapat dalam PP No.60 Tahun 2008 Tentang SPIP. Pengembangan indikator pertanyaan kuesioner diambil dari Zalni (2013).

b. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2)

Kompetensi sumber daya manusia adalah suatu keterampilan, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang terlibat dalam suatu organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan

organisasi yang telah ditetapkan. Dengan 9 item pertanyaan sesuai dengan Penjelasan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2008, yaitu kompetensi sumber daya manusia terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan perilaku individu. Pengembangan indikator pertanyaan kuesioner diambil dari Fadilah (2013).

c. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_3)

Sistem akuntansi pemerintahan daerah adalah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Dengan 10 item pertanyaan. Pengembangan indikator pertanyaan kuesioner diambil dari Permadi (2013).

d. Pengawasan Fungsional (X_4)

Sonny Sumarsono (2010:253) menyatakan bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah. Dengan 12 item pertanyaan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 yaitu pengawasan fungsional dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pegusutan dan penilaian. Pengembangan indikator pertanyaan kuesioner diambil dari Suhandi (2010).

Analisis Regresi Berganda

Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Fungsional) terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

X_1 = Sistem Pengendalian Intern

X_2 = Kompetensi Sumber Daya Manusia

X_3 = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

X_4 = Pengawasan Fungsional

e = *Disturbance Error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Data Penelitian

Kuesioner dibagikan kepada 19 SKPD Pemerintah Kota Pariaman (76 orang). Kuesioner yang dibagikan sebanyak 76 buah dan kembali semuanya. Distribusi ke kuesioner tersebut ditunjukkan pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Karakteristik Data Penelitian

Keterangan	jumlah
Kuesioner yang dikirim	76
Kuesioner yang diambil	76
Kuesioner yang dapat	76

digunakan	
Kuesioner yang tidak kembali	0
Tingkat pengembalian yang digunakan (76/76 x 100%)	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2015

Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik lama masa kerja, responden dalam penelitian ini didominasi oleh pegawai yang masa kerjanya lebih dari 5 (lima) tahun dengan jumlah responden sebanyak 67 pegawai (88%), kemudian diikuti oleh responden yang lama masa kerjanya kurang dari 5 (lima) tahun sebanyak 9 pegawai (12%). Dengan masa kerjanya yang lebih lama berarti pegawai di tiap instansi pemerintah sudah memahami dengan baik tentang pengelolaan keuangan daerahnya.

Dilihat dari karakteristik tingkat pendidikan, responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan tingkat pendidikan Strata satu (S1), yaitu sebanyak 62 pegawai (82%). Menunjukkan bahwa pegawai dengan tingkat pendidikan Strata Satu (S1) dapat memahami efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan baik, kemudian diikuti oleh responden dengan latar belakang pendidikan Strata Dua (S2) sebanyak 14 pegawai (18%). Menunjukkan bahwa pegawai dengan tingkat pendidikan Strata Dua (S2) lebih memahami efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan tidak ada pegawai dengan tingkat pendidikan S3, Diploma dan SMA.

Dilihat dari karakteristik latar jenis kelamin yang jenis kelamin pria sebanyak 55 orang atau sebesar 72%.

Sedangkan yang berjenis kelamin wanita sebanyak 21 orang atau sebesar 28%.

Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti tabel 3 berikut ini :

Tabel 3
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation	Rata-Rata Teoritis
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	76	28,00	45,00	357,105	358,819	27
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	76	50,00	71,00	601,316	535,996	45
Kompetensi Sumber Daya Manusia	76	20,00	44,00	358,158	448,913	27
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	76	29,00	49,00	397,105	427,338	30
Pengawasan Fungsional	76	33,00	58,00	455,921	481,713	36
Valid N (listwise)	76					

Sumber: Pengolahan Data Primer SPSS 21

Hasil Uji Kualitas Data

Pengujian validitas dan reliabilitas data dilakukan secara keseluruhan pada seluruh jumlah item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian dengan menggunakan program SPSS versi 21.0 for windows.

Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Di mana keseluruhan variabel penelitian terdiri dari 55 pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Uji signifikansi dilakukan

dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = $n - 2$ dengan α 0.05, n adalah jumlah sampel. Dalam penelitian ini $df = n-2$ ($76-2$) = 74, sehingga didapat r_{tabel} untuk df (74) = 0.226.

Berdasarkan hasil uji validitas dari keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variable-variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid, hal ini dapat dilihat dari nilai $r_{hitung} >$ nilai r_{tabel} . Dimana nilai r_{tabel} untuk sampel sebanyak 76 adalah 0,226.

Hasil Uji Reliabilitas Data

Setelah dilakukan uji validitas, langkah selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas data yaitu dengan melihat nilai *cronbach's alpha*. Jika nilai *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0.6 maka kuesioner penelitian tersebut dinyatakan reliabel.

Untuk melihat hasil reliabilitas variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel Penelitian	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,617	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1)	0,766	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	0,734	Reliabel
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3)	0,728	Reliabel
Pengawasan Fungsional (X4)	0,689	Reliabel

Sumber: Pengolahan Data Primer SPSS 21

Uji Asumsi Klasik

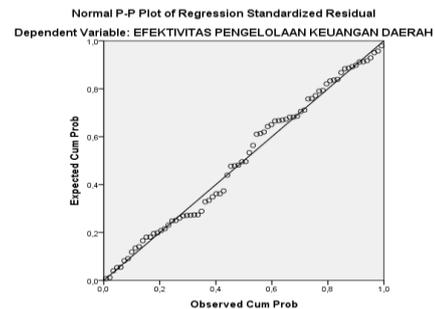
Uji asumsi klasik adalah pengujian pada variabel penelitian dengan model regresi, apakah dalam

variabel dan model regresinya terjadi kesalahan.

Uji Normalitas Data

Hasil pengujian normalitas data dengan *P-P Plot* untuk variabel dependen (Y) efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

Gambar 1 Normal P-P Plot Regression Standardized Residual



Sumber: Pengolahan Data Primer SPSS 21

Dari grafik *P-P Plot* dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas Data

Model	Tolerance	VIF	Keterangan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1)	0,464	2,155	Tidak ada Multikolinier
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	0,691	1,446	Tidak ada Multikolinier
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3)	0,393	2,545	Tidak ada Multikolinier
Pengawasan fungsional (X4)	0,944	1,060	Tidak ada Multikolinier

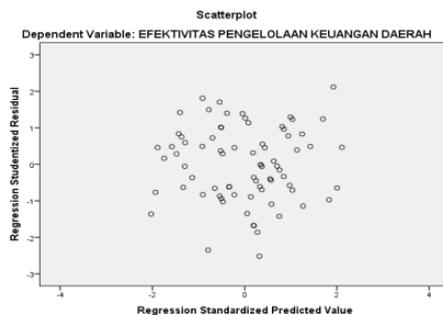
Sumber: Pengolahan Data Primer SPSS 21

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5 diatas, karena nilai *tolerance* yang dihasilkan berkisar antara 0,1 sampai 1,0 dan nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai diantara 1 sampai 10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independendalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 2 berikut:

Gambar 2
Scatterplot



Sumber: Pengolahan Data Primer
SPSS 21

Dari grafik *scatterplot* di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta penyebarannya terletak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi

N	K	dL	dU	4-dU	4-dL	Durbin-Watson	Keputusan
76	4	1,5190	1,7399	2,2601	2,481	2,225	Tidak terdapat Autokorelasi

Sumber: Pengolahan Data Primer
SPSS 21

Berdasarkan tabel hasil uji autokorelasi diatas diketahui nilai d_{hitung} (*Durbin Watson*) 2,225 dan nilai batas atas *Durbin Watson* sebesar 1,7399. Nilai 1.7399 dapat dilihat dari tabel *Durbin Watson* dengan $n = 76$ dan $k = 4$, dimana k adalah banyaknya variabel independen. Oleh karena nilai $dU < dW < 4-dU$ atau $1,7399 < 2,225 < 2,2601$. Dapat disimpulkan, tidak terdapat autokorelasi dalam model penelitian.

Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

X_1 = Sistem Pengendalian Intern

X_2 = Kompetensi Sumber Daya Manusia

X_3 = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

X_4 = Pengawasan Fungsional

E = *Disturbance Error*

Dari pengolahan data komputer program SPSS, maka hasil analisis regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	-4,490	2,923		-1,536	,129
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	,265	,056	,395	4,735	,000
Kompetensi Sumber Daya Manusia	,126	,056	,158	2,270	,026
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,322	,078	,384	4,113	,000
Pengawasan Fungsional	,153	,044	,206	3,523	,001

Sumber: Pengolahan Data Primer SPSS 21

Hasil Uji Hipotesis

Uji t dilakukan pada signifikan 5% ($\alpha = 0,05$), maka t tabel dapat diketahui sebagai berikut:

$$\begin{aligned} t_{\text{tabel}} &= n - k - 1 : \alpha / 2 \\ &= 76 - 4 - 1 : 0,05 / 2 \\ &= 71 : 0,025 \\ &= 1,994 \end{aligned}$$

Hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 8
Hasil Uji t

Variabel Bebas	t Tabel	t Hitung	Sig.	Keterangan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1,994	4,735	0,000	H ₁ diterima
Kompetensi Sumber Daya Manusia	1,994	2,270	0,026	H ₂ diterima
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	1,994	4,113	0,000	H ₃ diterima
Pengawasan Fungsional	1,994	3,523	0,001	H ₄ diterima

Sumber: Pengolahan Data Primer SPSS 21

Hasil Uji Hipotesis Pertama

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Terhadap Efektivitas

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu $4,735 > 1,994$ dan $\text{sig.t} (0,000) < 0,05$ dengan demikian H₀ ditolak dan H_a diterima.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Saleba (2014), menemukan hasil penelitiannya bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Simanungkalit (2013), yang menemukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Uji Hipotesis Kedua

Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu $2,270 > 1,994$ dan $\text{sig.t} (0,026) < 0,05$ dengan demikian H₀ ditolak dan H_a diterima.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Saleba (2014), menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Uji Hipotesis Ketiga

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu $4,113 > 1,994$ dan $\text{sig.t} (0,000)$

< 0.05 dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Pradita (2010) tentang sistem akuntansi keuangandaerah (SAKD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengujian Hipotesis Keempat

Pengawasan Fungsional Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,523 > 1,994$ dan $sig.t (0.001) < 0.05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wati (2010), tentang analisis atas pengawasan fungsional pengaruhnya terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada inspektorat kota Bandung. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan kota Bandung.

Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Berikut hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini :

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.876 ^a	.768	.755	1,77766

Sumber: Pengolahan Data Primer SPSS 21

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai *R Square* sebesar 0,768. Artinya adalah bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 76,8%. Sedangkan sisanya 23,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah dan pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang berada di Kota Pariaman. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian pertama menunjukkan bahwa Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Saleba (2014), Simanungkalit (2013) menemukan hasil penelitiannya bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
2. Hasil pengujian kedua menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini

- didukung dengan penelitian Saleba (2014), menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
3. Hasil penelitian ketiga menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Pradita (2010) tentang sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
 4. Hasil penelitian keempat menunjukkan bahwa Pengawasan Fungsional berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wati (2010), tentang analisis atas pengawasan fungsional pengaruhnya terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada inspektorat kota Bandung. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan kota Bandung.
 5. Nilai R Square (R^2) sebesar 0,768 (76,8%), ini menerangkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kota Pariaman dipengaruhi oleh faktor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Fungsional 76,8%.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas daerah penelitian dan memperbanyak jumlah responden. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penambahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah seperti teknologi informasi akuntansi dan lain-lain.
2. Bagi Akademis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah dan pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Bagi Pemerintah Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan

untuk dapat meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah dan pengawasan fungsional agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

4. Bagi Masyarakat
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai pengaruh pemahaman sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah dan pengawasan fungsional kota pariaman terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sehingga masyarakat sebagai pengguna laporan dapat mengetahui secara jelas mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010 . *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2014*.
- Fadilah, Mailani. (2013). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*
21. Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
-2007. *Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN
- Lamusu, Lusiana (2013). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo*.Jurnal. Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Permadi, Angga Dwi (2013). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat)*. Skripsi. Universitas Widyatama. Bandung.
- Pradita, Gilang (2010). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis*.Jurnal. Universitas Widyatama. Bandung.
- Priyatno, Duwi. 2010. *Teknik Mudah Dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian*

- Dengan SPSS. Yogyakarta: Gava Media.
- Saleba, Siti Nurjannah (2014). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal, Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsono, Sony. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*, edisi pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Wati, Sinta Suhandi (2010). *Analisis Atas Pengawasan Fungsional Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Inspektorat*. Jurnal. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.
- www.online.wako.pariaman.sampaiakanLKPD